

PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN KARAKTER

Syarifah Aini¹

¹Mahasiswa Pendidikan Dasar, Prodi Pendidikan Dasar Universitas Negeri Medan
Corresponding author: Syarifahaini10@gmail.com

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam pendidikan formal, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), atau lebih tepat PPKN atau PMP kembali merupakan satu-satunya Mata Pelajaran yang langsung memberikan pendidikan tentang kewarganegaraan dan membangun karakter peserta didik (Character Building) sesuai dengan Pancasila. Dalam mencapai tujuan ini tentunya Pendidikan PKn tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, seperti mata pelajaran agama. Pekerjaan ini memang bukan hanya bertumpu pada mata pelajaran PKn tetapi mata pelajaran PKn akan menjadi dasar dan motor dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang ada, dan guru.

Kata Kunci : Pendidikan, Karakter

PENDAHULUAN

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang fokus materinya berupa peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Prewitt & Dawson, dan Aziz dkk dalam Cholisin, 2004:10).

Pendidikan Kewarganegaraan lebih merupakan bentuk pengajaran politik atau pendidikan politik. Sebagai pendidikan politik berarti fokusnya lebih menekankan bagaimana membina warga negara yang lebih baik (memiliki kesadaran politik dan hukum) lewat suatu proses belajar mengajar (Cholisin, 2004:11). Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam pendidikan formal, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), atau lebih tepat PPKN atau PMP kembali merupakan satu-satunya Mata Pelajaran yang langsung memberikan pendidikan tentang kewarganegaraan dan membangun karakter peserta didik (Character Building) sesuai dengan Pancasila. Jika pergantian kurikulum ikut mengubah nama dan materi PPKN dengan meninggalkan Pancasila sebagai karakter yang mesti diterapkan kepada peserta didik, dikhawatirkan ke depannya generasi muda Indonesia semakin mengalami keterpurukan karakter atau karakter yang buruk (bad character) dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan negara ini, sekarang saja sudah terlihat dampaknya, maraknya tawuran pelajar yang sudah menjurus kepada tindakan kriminal, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelajar dan sebagainya.

Untuk mewujudkan pendidikan PKn sebagai bagian dari pendidikan karakter yang mengandung moral, nilai, demokrasi serta Pancasila, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan guru PKn, yakni sebagai berikut: 1. Dalam pembelajaran PKn sebaiknya dilakukan dengan pendekatan komprehensif, baik komprehensif dalam isi, metode, maupun dalam keseluruhan proses pendidikan. Isi pendidikan PKn hendaknya meliputi semua permasalahan yang berkaitan dengan pilihan nilai pribadi sampai nilai-nilai etika yang bersifat umum. Selain itu, guru PKn juga perlu memahami dengan baik mengenai konsep dan indikator karakter yang hendak diinternalisasikan kepada peserta didik supaya guru PKn dapat membuat silabus dan RPP dengan baik sehingga dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif. 2. Metode pembelajaran PKn yang digunakan oleh guru PKn, harus mengembangkan pembelajaran aktif dengan menggunakan banyak metode belajar seperti penanaman nilai melalui studi pustaka, klarifikasi nilai melalui mengamati/mengobservasi, analisis nilai melalui pemecahan masalah/kasus, maupun diskusi kelas untuk menanamkan nilai berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif. 3. Guru PKn hendaknya menjadi model atau contoh bagi peserta didik sebagai guru yang berkarakter. Jadi dalam setiap sikap dan tindakan guru PKn harus menggambarkan karakter yang diinternalisasikan kepada peserta didiknya. 4. Untuk mewujudkan PKn sebagai bagian dari pendidikan karakter maka harus menciptakan kultur sekolah yang kondusif bagi pengembangan karakter peserta didik. Sehingga, kultur sekolah yang berupa norma-norma, nilai-nilai, sikap, harapan-harapan, dan tradisi yang ada di sekolah yang telah diwariskan dan dipegang bersama yang mempengaruhi pola pikir, sikap, dan pola tindakan seluruh warga sekolah. Karena kultur sekolah yang positif dan sehat akan berdampak pada motivasi, prestasi, produktivitas, kepuasan serta kesuksesan siswa dan guru.

Dalam mencapai tujuan ini tentunya Pendidikan PKn tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, seperti mata pelajaran agama. Pekerjaan ini memang bukan hanya bertumpu pada mata pelajaran PKn tetapi mata pelajaran PKn akan menjadi dasar dan motor dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang ada, dan guru PKn akan menjadi pengontrol dan pembimbing dalam pelaksanaannya. Tentu saja, untuk mewujudkan tujuan ini, guru PKn harus didukung dan dibantu oleh semua warga sekolah melalui kerjasama yang baik antara semua pihak, baik oleh kepala sekolah, guru, siswa, serta komite sekolah.

PEMBAHASAN

Menurut Setiawan D (2017), Pengertian secara khusus, karakter adalah nilai-nilai yang khas baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdamak baik terhadap lingkungan) yang terpatri dalam diri dan terwujud dalam perilaku. Perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengalami perubahan naik turun dari nama pelajaran, muatan, isi kurikulum, maupun buku teks serta inivasi pembelajarannya. Ada beberapa konsep tentang pendidikan kewarganegaraan, Cogan (1998:5) mengartikan pendidikan kewarganegaraan berperan penting sebagai penyiapan generasi muda (siswa) untuk menjadi warga negara yang memiliki identitas dan kebanggaan nasional, serta memiliki pengetahuan dan kecakapan serta nilai-nilai yang diaplukan untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Penelitian IEA terhadap implementasi pendidikan kewarganegaraan di 28 negara secara umum ditemukan bahwa komponen pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek civiv knowledge, civic engagement dan civic attitudes serta konsep lainnya (Torney-purta, et. al, 2001: 179).

Pada tahun 1990-an, pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara di pahami secara berbeda-beda. Dari kajian Print (1999;2000) terhadap pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di asia dan pasifik, ditemukan ada yang menyebut pendidikan kewarganegaraan sebagai civic education yang mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi, rule of law, serta hak dan tanggung jawab warga negara.

Untuk lainnya, pendidikan kewarganegaraan disebut dengan citizenship education dengan cakupan dan penekanan meliputi proses demokrasi, parisipasi aktif warga negara dan keterlibatan warga negara dalam suatu civil society. Namun kajian civic education memasikan pembelajaran yang berhubungan dengan institusi-institusi dan sistem yang melibatkan pemerintah, budaya politik, proses demokrasi, hak & tanggung jawab warga negara, administrasi publik dan sistem peradilan (Print, 1999; 2000).

Pendidikan Kewarganegaraan SD Berfungsi Sebagai Pendidikan Akhlak Mulia dan Budi Pekerti Luhur. Seperti kita ketahui, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai pendidikan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Hal ini terlihat dari tujuan pendidikan kewarganegaraan yang ada. Dalam Encyclopedia of Educational Research dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat dibagi 2, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pendidikan kewarganegaraan membahas masalah hak dan kewajiban. Sedangkan dalam arti luas, pendidikan kewarganegaraan membahas masalah moral, etika, sosial, serta berbagai aspek kehidupan ekonomi (Suriakusumah, 1992). Sedangkan Turner dkk. mengungkapkan bahwa civics merupakan suatu studi tentang hak-hak dan kewajiban dari warga negara. Sedangkan dalam standar kompetensi kurikulum 2004, ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan (citizenship education) adalah merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945.

Dari beberapa uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan keawarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang dirasa menjadi sangat penting karena fungsinya yang membentuk kepribadian anak karena mengajarkan anak tentang pendidikan moral, pendidikan nilai ataupun pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti adalah suatu proses pembentukan perilaku atau watak seseorang, sehingga dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk dan mampu menerapkannya dalam kehidupan.

Pendidikan budi pekerti pada hakikatnya merupakan konsekuensi tanggung jawab seseorang untuk memenuhi suatu kewajiban. Budi pekerti lahir karena fakta, persepsi atau kepedulian untuk melakukan hubungan sosial secara harmonis melalui perilakunya. Parameter budi pekerti yang luhur adalah kesesuaiannya dengan norma, etika, dan ajaran agama yang dianut suatu masyarakat. Pelaksanaan pendidikan budi pekerti di sekolah dapat dilakukan melalui dua pendekatan.

Pertama, melalui integrasi dengan pelajaran yang memiliki pokok bahasan yang sesuai seperti pendidikan agama Islam (PAI) dan pendidikan kewarganegaraan (PKn) dengan cara menambah materi titipan. Kedua, melalui pendekatan modeling, imitasi atau keteladanan yang dilakukan oleh guru. Jika guru menggunakan cara yang pertama, maka guru berfungsi sebagai pengajar, sedangkan jika cara yang kedua yang digunakan maka guru berfungsi sebagai pendidik (Suwandi, 2000).

Budi pekerti merupakan perilaku (behaviour), bukan pengetahuan sehingga untuk dapat diinternalisasi oleh anak didik, maka harus diteladankan bukan diajarkan. Sehingga pendekatan yang kedua lah yang lebih tepat untuk menjalankan pendidikan budi pekerti ini, yaitu dengan pendidikan kewarganegaraan. Seperti kita ketahui, saat kita masih duduk di bangku SD, materi pendidikan kewarganegaraan adalah materi mengenai sikap dan tingkah laku. Seperti sopan santun, tata karma, bagaimana sikap kita sebagai seorang warga negara Indonesia, budi pekerti, tenggang rasa, toleransi, dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai mata pelajaran yang mengajarkan pendidikan moral bangsa.

Tanpa pendidikan kewarganegaraan, akan mustahil kita mendapatkan pelajaran mengenai moral. Walaupun memang ada sebagian mata pelajaran atau guru yang mengajarkan pendidikan moral, tapi tidak akan mendalam seperti apa yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ini bukan hanya mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang warga negara yang baik, tapi juga mengajarkan bagaimana rasa tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara. Dengan di berikannya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, maka pribadi seseorang akan terbentuk. Yaitu pribadi yang mencintai negaranya dan pribadi yang luar biasa santunnya. Apabila moral yang baik tersebut telah terbentuk, maka akan susah sekali menciptakan seseorang yang suka korupsi, melanggar aturan, merugikan negara, atau bahkan mempermalukan negaranya sendiri.

Menurut Maika Sandra Puspita seorang mahasiswa yang merasakan pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan mengatakan, "Kita memang harus mempelajari pendidikan kewarganegaraan karena pembahasannya yang begitu penting yang menjadikan kita menjadi seorang warga negara yang bermoral." Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika moral sudah tertanam, maka untuk mempelajari pelajaran apapun, kita tidak akan menyeleweng, karena moral kebaikan telah tertanam secara kuat. Apalagi dengan adanya manfaat yang telah disebutkan diatas, sudah seharusnya warga negara Indonesia, wajib mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Pembentukan pribadi manusia yang bermoral tersebut di Indonesia, diprasaranai oleh pendidikan kewarganegaraan.

Dengan demikian, selain membentuk manusia yang berbangsa dan bernegara, pendidikan kewarganegaraan juga berfungsi sebagai pendidikan moral atau pendidikan nilai atau pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti yang membentuk manusia yang berkepribadian baik sesuai dengan nilai, norma dan peraturan yang ada di Indonesia.

Keragaman nilai dalam Pancasila merupakan modal dasar pendidikan karakter. Kita tidak perlu lagi mencari-cari bentuk bahkan model pendidikan karakter karena basis kekuatan karakter bangsa telah kita miliki. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama dapat kita jadikan acuan pembelajaran beberapa nilai. Nilai toleransi selama ini hanya menjadi wacana dan sulit untuk dilaksanakan dikarenakan berhenti pada tataran wacana kognitif.

Hal tersebut mengakibatkan kelemahan karakter masyarakat. Sekolah seharusnya mulai mampu mencoba untuk menguraikan sila pertama menjadi bahan-bahan nilai dalam pendidikan karakter. Misalnya, toleransi, penghargaan terhadap kepercayaan lain melalui kegiatan-kegiatan permainan yang menarik. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi bagian penting dalam rantai karakter bangsa.

Memberadabkan sesama manusia menjadi modal utama dalam relasi sosial. Salah satu faktor dalam pendidikan karakter adalah kemampuan untuk memberikan apresiasi kepada orang lain. Melalui kegiatan praktis misalnya kerapian, kebersihan diri, ketekunan merupakan proses belajar untuk menjadi beradab. Hal tersebut dapat diajarkan melalui manajemen konflik. Sebagian orang melihat konflik adalah hal tabu sehingga konflik disingkirkan dari ranah pembelajaran. Padahal, dalam konflik, kita dapat saling memberadabkan manusia. Konflik tentu bukan berarti anarkis, konflik dapat diajarkan melalui proses debat dan pemaparan argumen. Penting kiranya bahwa pendidikan manajemen konflik bertujuan untuk memberadabkan manusia dengan saling menghargai. Sila Persatuan Indonesia mampu diuraikan dengan mengenalkan budaya Indonesia secara fisik. Berbagai hasil kebudayaan nasional sebagai contoh kebijaksanaan lokal adalah pintu masuk bagi pemahaman persatuan.

Karakter persatuan yang mendasar adalah cinta Tanah Air. Proses cinta Tanah Air tentu tidak perlu lagi dengan cara-cara yang sangat abstrak. Karakter ini dapat dibangun dengan membangun kreativitas siswa, tentu dengan masih membawa ciri khas kebudayaan daerah. Kreativitas siswa sangat erat dengan kemampuan memahami secara kognitif (competence). Menurut Setiawan (2013) Pembangunan karakter bangsa yang sudah diupayakan dengan berbagai bentuk, hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal.

Hal itu tercermin dari semakin meningkatnya kriminalitas, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan hukum, kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai pelosok negeri, pergaulan bebas, pornografi dan pornoaksi, tawuran yang terjadi di kalangan remaja, kekerasan dan kerusuhan, serta korupsi yang kian merambah pada semua sektor kehidupan. Menurut Setiawan (2014) Pembangunan karakter bangsa harus diaktualisasikan secara nyata dalam bentuk aksi nasional dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa sebagai upaya untuk menjaga jati diri bangsa dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam naungan NKRI. Masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan kesantunan dalam berperilaku, musyawarah-mufakat dalam menyelesaikan masalah, kearifan lokal yang kaya dengan pluralitas, sikap toleran dan gotong-royong, mulai cenderung berubah menjadi hegemoni kelompok-kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku egois individual.

Dengan bantuan teknologi, kita dapat mengenalkan keragaman daerah dengan mudah. Bukan hanya itu saja, proses kreativitas juga makin mudah dengan bantuan teknologi. Karakter cinta Tanah Air dapat sangat terbantu dengan kehadiran alat modern sehingga dalam mengajar pun kita lebih mudah dan menarik. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah sila yang saat ini selalu menjadi acuan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Satu masalah yang menarik adalah kita memiliki dasar nilai demokratis, namun tidak dapat dilaksanakan. Nilai demokrasi yang mendasar adalah taat asas, sesuai prosedur dan menghargai martabat orang lain sesuai hati nurani (conscience). Inilah yang dapat disampaikan dalam pembelajaran pendidikan karakter siswa. Siswa dikenalkan dengan prosedur yang benar dan sesuai aturan/asas yang berlaku. Hal ini bukan untuk mengajak siswa menjadi pribadi yang semata patuh, namun mengajak mereka menjadi pribadi yang taat.

Taat adalah bagian dari disiplin maka cara sila keempat ini dapat diawali dengan memberikan latihan disiplin diri untuk menghargai proses yang melibatkan orang lain. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan basis kepekaan sosial yang sangat mendasar. Manusia yang berkarakter salah satu indikasinya adalah mampu berjuang untuk sesama, bukan untuk dirinya. Itulah yang dimaksud dengan keadilan sosial, keadilan sosial tidak perlu lagi dibahas dalam cakupan yang luas dan menerawang, namun dalam kegiatan sehari-hari siswa. Apakah siswa telah berbela rasa (compassion) kepada siswa lain? Hal inilah yang dapat diuraikan dalam pembelajaran sehari-hari. Sudah sahnya bagi tiap sekolah untuk meletakkan kembali Pancasila sebagai acuan dasar dalam membentuk karakter siswa. Terbukti Pancasila sangat kaya akan nilai-nilai keutamaan hidup yang mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia. Sejahtera berarti bebas dari tindakan anarkis, lepas dari masalah fundamentalitas agama, radikalisme kesukuan, dualisme minoritas-mayoritas, dan perekonomian yang stabil dan merata. Satu-satunya jalan mewujudkan kesejahteraan adalah melalui pendidikan karakter.

SIMPULAN

Karakter cinta Tanah Air dapat sangat terbantu dengan kehadiran alat modern sehingga dalam mengajar pun kita lebih mudah dan menarik. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah sila yang saat ini selalu menjadi acuan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Satu masalah yang menarik adalah kita memiliki dasar nilai demokratis, namun tidak dapat dilaksanakan. Nilai demokrasi yang mendasar adalah taat asas, sesuai prosedur dan menghargai martabat orang lain sesuai hati nurani (conscience).

Terbukti Pancasila sangat kaya akan nilai-nilai keutamaan hidup yang mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia. Sejahtera berarti bebas dari tindakan anarkis, lepas dari masalah fundamentalitas agama, radikalisme kesukuan, dualisme minoritas-mayoritas, dan perekonomian yang stabil dan merata. Satu-satunya jalan mewujudkan kesejahteraan adalah melalui pendidikan karakter.

REFERENSI

- Aqib, Zainal; Sujak. *Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter*. 2011. Bandung: Yrama Widya
- Deny Setiawan (2013). *Jurnal Pendidikan Karakter*. Peran Pendidikan Karakter Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral.
- Deny Setiawan. (2014). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. P-ISSN 2085-482X. E-ISSN 2407-7429. Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan.
- Deny Setiawan. (2017). ISSN: 2598-3237. *Pendidikan Karakter Sebagai Pilar Pembentukan Karakter Bangsa*.
- Kesuma, Dharma; Cepi, Triatna; Johar, Permana. 2011. *Pendidikan Karakte Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narwanti, Sri. 2011. *Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Familia.
- Sagala, Syaiful, 2005, *Konsep dan Makna Belajar untuk membantu memecahkan problematika belajar dan mengajar*, Bandung:CV. Alfabeta.
- Samani, Muchlas; Hariyanto. 2014. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Setiawan.D. 2014. *Pendidikan Karater dalam Perspektif Kewarganegaraan*. Medan. Larispa Indonesia.
- Soegito AT dkk. 2013. *Pendidikan Pancasila*. Semarang:Pusat Pengembangan MKU/MKDK Universitas Negeri Semarang.
- Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Zamroni. 2013. *Pendidikan Demokrasi*. Yogyakarta. Ombak.